

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Tahun 2023**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2018-2023

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN. Adapun Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja yang telah disusun oleh DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN di tahun 2023 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di

lingkungan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan,

2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN



MOHAMMAD HASAN FAISOL,S.STP,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19830714200112100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	15
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	16
D. Landasan Hukum	17
E. Sistematika	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	41
B. Realisasi Anggaran	76
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
BAB IV PENUTUP	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- *) Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2016 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:Kepala Dinas :
- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian perencanaan dan keuangan
 2. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum,membawahi :
 1. Seksi Perencanaan,pendataan, dan evaluasi
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan
 3. Seksi Air Minum

c. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahi:

1. Seksi Perencanaan, pendataan dan evaluasi
2. Seksi Perumahan, pertanahan dan prasarana sarana dan utilitas
3. Seksi Permukiman

d. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Gedung, membawahi :

1. Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi
2. Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung
3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung

• **Adapun Kelompok Jabatan Fungsionalnya tersusun sebagaimana berikut :**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- > Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
- > Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- > Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1) Sekretariat :

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat.
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan
- f. Pengelolaan barang milik daerah , dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Pada sekretariat terdapat sub – sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada sekretaris. **Adapun sub sub bagian pada sekretaris adalah :**

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian.
2. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
3. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
4. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

5. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
6. Melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan .
7. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
8. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
9. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
10. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
11. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan.
2. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan
3. Melakukan penyusunan anggaran
4. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
5. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan
6. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pengeluaran keuangan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
8. Melakukan penyusunan laporan keuangan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
10. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

11. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja,.
12. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
13. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
14. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan,Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2). Bidang Tata Bangunan dan Gedung :

Bidang Tata Bangunan dan Gedung mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang tata bangunan dan gedung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata bangunan dan Gedung, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang tata bangunan dan gedung
- b. Penyusunan kebijakan bidang tata bangunan dan gedung
- c. Perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang tata bangunan dan gedung
- d. Peningkatan fisik bangunan dan gedung
- e. Pemeliharaan bangunan dan gedung
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. **Seksi Perencanaan, Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan, dan evaluasi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang tata bangunan dan gedung

- c. Melakukan perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang tata bangunan dan gedung
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- f. Melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggran Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung.
- b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan fisik bangunan gedung
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perijinan dibidang tata bangunan dan gedung
- d. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- f. Menyusun dan melaksanakan Standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
- b. Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung daerah, rumah dinas, dan bangunan umum beserta lingkungannya.

- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- d. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- e. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- (*) bidang perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - b. Penyusunan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. Penyusunan perencanaan, pendataan, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - d. Pelaksanaan fasilitas kegiatan perumahan dan pertanahan
 - e. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana utilitas bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Melakukan pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(b) Seksi Perumahan, Pertanahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perumahan, pertanahan dan prasarana sarana dan utilitas.
- b. Melaksanakan fasilitas rumah umum, rumah khusus, dan rumah komersil
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah swadaya
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pemanfaatan lahan perumahan

- e. Melaksanakan penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- g. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(c) Seksi Permukiman, Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi permukiman
- b. Melaksanakan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas pada permukiman berupa penyelenggaraan jalan lingkungan permukiman.
- c. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4). **Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum :**

- (*) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang penyehatan lingkungan dan dan air minum
- (*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air minum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang penyehatan lingkungan dan air minum
 - b. Penyusunan kebijakan bidang penyehatan lingkungan dan air minum
 - c. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (a) **Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi, mempunyai tugas :**
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penyehatan lingkungan dan air minum
 - c. Melakukan pendataan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan air minum.
 - d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

- e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(b) **Seksi Air Minum, Mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi air minum.
- b. Melaksanakan fasilitas penyediaan air minum
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan penyediaan air minum
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan air minum
- e. Melaksanakan penyediaan prasarana sarana utilitas penyediaan air minum
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(c) Seksi Penyehatan Lingkungan, Mempunyai tugas :

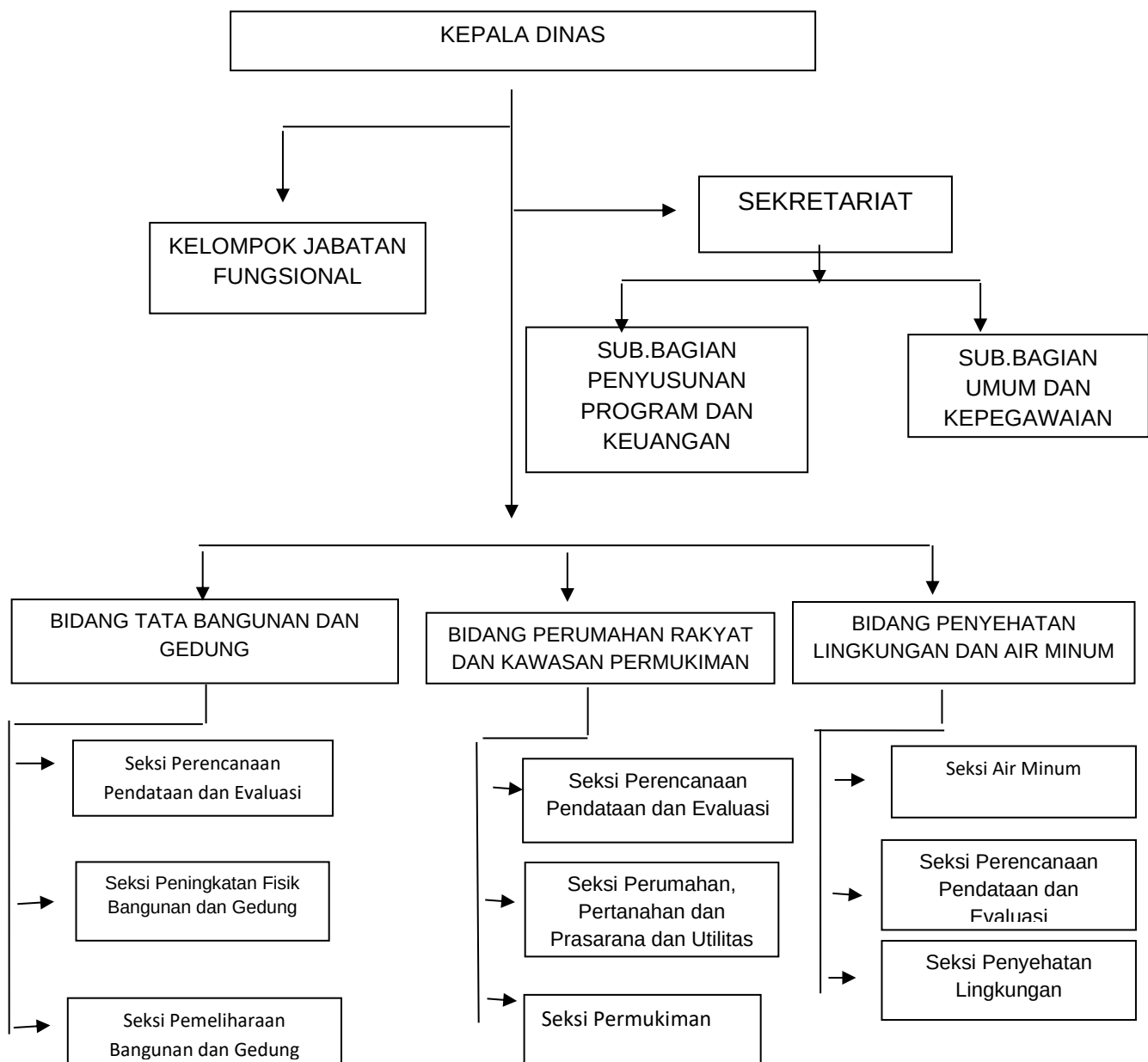
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan
- b. Melaksanakan fasilitasi penyehatan lingkungan
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan penyehatan lingkungan
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyehatan lingkungan
- e. Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana utilitas penyehatan lingkungan
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- g. Melaksanakan dokumen, pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI)
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN.

Struktur Organisasi

Gambar 1.1 :

Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berdasarkan Perda No.40 Tahun 2016 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan



A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Genangan air di beberapa lokasi strategis dan lokasi perumahan pada saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.
2. Belum Optimalnya Penataan Kawasan Kumuh
3. Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan Berkelanjutan dan Sanitasi
4. Meningkatkan Pendapatan dan Menurunkan Beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
5. Kondisi gedung pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
7. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air
8. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan.

9. Sistem drainase yang kurang baik sehingga hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
10. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023 adalah

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Dimana Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023. Dalam hal ini Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2018 - 2023 juga ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, dimana Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGILIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegrasi tinggi
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi .

Sedangkan Perumusan tujuan dan sasaran DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN mengacu pada Misi ke-5 yaitu :

“Akselerasi pembangunan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis, sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target sebagai penjelasan berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman	1.1	1.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat	1.Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48.17 %	48.19 %	48.16 %	48.18 %	48.20 %
				2.Prosentase Penyediaan Sarpras air bersih dan sanitasi	40%	45%	49%	54%	59%
			2. Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan gedung pemerintah	3.Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	12%	14%	14%	16%	18%
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN		SUMBER DATA
						FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	1.1	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik					
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat		1. Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Prosentase	Meningkatkan kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni	$\frac{\text{Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	X100	Dinas PRKP

			2. Prosentase Penyediaan Sarpras air bersih dan sanitasi	Prosentase	Meningkatkan Penyediaan Sarpras air bersih dan sanitasi	$\frac{\text{Rumah Tangga yang memiliki akses / pengguna air bersih \& Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$	X100	Dinas PRKP
	2. Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung Pemerintah		1. Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	Prosentase		$\frac{\text{jmlh Bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{Jmlh seluruh bangunan gedung pemerintah}}$	X 100	Dinas PRKP
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	2.1	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	prosentase	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan selama 1 tahun			Dinas PRKP

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahunan 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung pemerintah	1. Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni 2. Prosentase Penyediaan Sarpras air bersih dan sanitasi 3. Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	Prosentase Prosentase prosentase	48.20% 59% 18 %
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	prosentase	100%

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja pada DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan Desember tahun 2023 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN sebagai mana berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	4. Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni 5. Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi	48.20% 59%
2	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung pemerintah	1. Prosentase Bangunan Dalam Kondisi Baik dan Representatif	18%
3	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian PROGRAM DAN KEGIATAN pada DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN :

Tabel 2.5
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN
Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	59%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM	59%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	4500 SR
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya	4500 SR

		/SPAM berbasis masyarakat	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 SR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	59 %
	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik setempat	59 %
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	914 Rumah Tangga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	59 %

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase permukiman yang tertangani	59 %
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun	18 %
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber- IMB & berSLf	18 %
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300 d0c
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	3 unit

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya	18%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Penataan bangunan dan lingkungannya yang tertangani	18 %
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Korban Bencana	48,20 %

	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	48,20 %
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	9 Unit
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	48,20 %
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman	48,20 %
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DATABASE RTLH yang disusun	2 doc
		Jumlah Dokumen Harga Standar Bahan Bangunan dan Upah	2 doc
b	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani	48,20%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Di perbaiki	45 Unit

	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	9 Ha
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan	48,20%
		Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan	48,20%
	Verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 PSU Perumahan
		Jumlah Perumahan Yang diserahterimakan PSU nya Kepada Pemerintah Daerah	10 PSU Perumahan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan	100

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 doc
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bln
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Lap

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun	6 dokumen
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 lap
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31 lap
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	104 paket

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 doc
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290 lap
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 lap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 lap
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipeliharaan	24 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	103 unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Bangkalan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi dari DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik					
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat	1.Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48,20%	64.67%	134.17%	Sangat Tinggi	DPRKP
		2.Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi	59%	37.05%	62.80%	Rendah	DPRKP
	Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan Gedung pemerintah	3.Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	18%	10%	55.56%	Rendah	DPRKP

2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Dinas PRKP

Uraian penjelasan berdasarkan tabel diatas:

Pengukuran target kinerja berdasarkan tujuan / sasaran strategis diatas, yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dari organisasi. Pengukuran capaian indikator tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Nilai capaian kinerja yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan didalam mewujudkan tujuan dan sasaran dapat dikategorikan Sangat tinggi dan rendah karena kriteria penilaian yang diuraikan dalam setiap sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan pada Capaian Kinerja yang disajikan per sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat.

Ad.1 (Indikator Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni).

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 48.20%, sementara realisasi mencapai 64.67%, maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni pada tahun 2023 Sangat Tinggi sebesar 134.17%, Realisasi yang dicapai didalam indikator prosentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2023 melebihi apa yang sudah di targetkan dalam sasaran strategis. Faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah adanya dukungan anggaran yang bersumber dari DAK dan APBD.

Ad.2(Indikator Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi).

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas, target kinerja tahun 2023 sebesar 59%, sementara realisasi kinerja mencapai 37.05% ,maka diperoleh *capaian kinerja di tahun 2023 dengan Indikator Sasaran Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi sebesar 62.80%.*

Adapun realisasi kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 termasuk dalam katagori rendah, dan masih kurang dari apa yang sudah ditargetkan dalam sasaran strategis, dan hal ini dikarenakan factor anggaran yang tersedia.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata bangunan dan Gedung pemerintah

Ad.1 (Indikator Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif).

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target kinerja tahun 2023 sebesar 18%, sementara realisasi kinerja mencapai 10%, maka diperoleh capaian kinerja ditahun 2023 dengan Indikator Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif pada tahun 2023 sebesar 55.56%, Adapun realisasi kinerja pada indicator ini ditahun 2023 termasuk dalam katagori rendah, dan masih kurang dari apa ang sudah ditargetkan dalam sasaran strategis, dan hal ini dikarenakan factor anggaran yang tersedia.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3 2020	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun 2023		
			Realisa si	Realisa si	Realisa si	Target	Realisa si	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	35.73	36.04	36.18	41.73	37.24	89.24%
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat	1.Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48.19%	48.11%	48.16	48,20 %	64.67%	134.17%
		2.Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi	45%	47%	46.39%	59 %	37.05%	62.80%
	Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan Gedung pemerintah	3.Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	14%	13%	14%	18%	10%	55.56%
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						

	Kawasan Permukiman							
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mencermati tabel 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Evaluasi keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja yakni dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023, perbandingan dilakukan berdasarkan hasil konversi terhadap realisasi indikator kinerja utama pada renstra sebelumnya. Dari perbandingan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja mengalami naik turun karena disebabkan oleh anggaran yang tersedia sebagai mana penjelasan berikut :

- *) Jika dilihat capaian kinerja Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat”, dengan indikator “ Prosentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni” , capaian kinerja turun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan ditahun 2023 mengalami kenaikan lagi dan hal tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran terkait pandemi Covid-19 ditahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang mengharuskan beberapa kegiatan dihapuskan / dikurangi, sehingga berpengaruh pada pencapaian strategis dinas.
- *) Jika dilihat capaian kinerja Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat”, dengan indikator “ Prosentase Penyediaan sarpras air bersih dan sanitasi” , capaian kinerja turun dari

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dan hal tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran terkait pandemi Covid-19 ditahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang mengharuskan beberapa kegiatan dihapuskan / dikurangi, sehingga berpengaruh pada pencapaian strategis dinas.

- *) Jika dilihat capaian kinerja *Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung pemerintah ”, dengan indikator “ Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representative ”* , turun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan ditahun 2023 mengalami kenaikan lagi, dan hal tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran terkait pandemi Covid-19 ditahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang mengharuskan beberapa kegiatan dihapuskan / dikurangi, sehingga berpengaruh pada pencapaian strategis dinas.
- *) Jika dilihat capaian kinerja *Pada Sasaran Strategis Terpenuhi nya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan* , maka secara umum rata – rata capaian kinerja sudah 100 % dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 .

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
(Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2018 – 2023)

N o.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan Gedung pemerintah	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 1.Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni 2.Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi 3.Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	64.67% 37.05% 10%	48,20% 59% 18%	134.17% 62.80% 55.56%

2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100 %	100 %	100 %

Uraian penjelasan tabel:

Capaian Kinerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan terhadap Target Jangka Menengah dapat disimpulkan bahwa untuk *sasaran* : “Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat dengan Indikator Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dapat disimpulkan berhasil “ Sedangkan untuk *indicator* Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi kurang berhasil “ hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia. Demikian pula dengan *Sasaran* “Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah dengan Indikator Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representative, dapat disimpulkan kurang berhasil , hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

*) Jika dilihat dari tabel diatas dimana Tingkat Kemajuan Capaian kinerja Pada *Sasaran* “ Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat “ dengan indikator “ Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni”, ditahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 134.17 % dengan rumusan realisasi kinerja ditahun 2023 dibagi target akhir ditahun 2023.

- *) Jika dilihat dari tabel diatas dimana Tingkat Kemajuan Capaian kinerja Pada Sasaran “ *Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat “ dengan indikator “ Prosentase penyediaan sarpras air bersih dan sanitasi”*, ditahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 62.80 % dengan rumusan realisasi kinerja ditahun 2023 dibagi target akhir ditahun 2023 .
- *) Jika dilihat dari tabel diatas dimana Tingkat Kemajuan Capaian Pada Sasaran “ *Meningkatnya kualitas tata bangunan dan Gedung pemerintah “ dengan indikator “ Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif”*,ditahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 55.56 % dengan rumusan realisasi kinerja ditahun 2023 dibagi target akhir ditahun 2023.
- *) Jika dilihat dari tabel diatas dimana Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Pada Sasaran “*Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan “ dengan indikator “Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan”*”, ditahun 2023 menunjukkan tingkat capaian sebesar 100 % dengan memakai rumusan : *realisasi kinerja ditahun 2023 dibagi target akhir ditahun 2023 .*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan Gedung pemerintah	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 1.Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni 2.Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi 3.Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	64.67% 37.05% 10 %	-	
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	-	

	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan			
--	--	---	--	--	--

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan Gedung pemerintah	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 1.Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni 2.Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi 3.Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	48,20% 59% 18%	64.67% 37.05% 10%	134.17% 62.80% 55.56%		
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					

	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100 %	100%	100 %		
--	--	--	-------	------	-------	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan *pencapaian target kinerja sasaran untuk kinerja :*

1. Prosentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni dapat mencapai target yang diperjanjikan dan berpredikat sangat baik.
2. Prosentase Penyediaan Sarpras Air Bersih dan Sanitasi belum mencapai target yang diperjanjikan dikarenakan anggaran yang terbatas.
3. Prosentase Bangunan dalam kondisi baik dan representatif belum mencapai target yang diperjanjikan dikarenakan anggaran yang terbatas.

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 ini disebabkan karena :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing masing penanggung jawab Kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada Tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak focus pada hasil.

Selain terdapat penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan. *Solusi yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan kemampuan SDM dalam pencapaian beban kerja.*
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. *Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)*
- c. Ketersediaan data untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan belum optimal. *Solusi yang telah dilakukan adalah dengan merencanakan pembangunan database yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.*
- d. Terbatasnya anggaran yang disediakan

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program/kegiatan yang terdani melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan untuk Tahun 2023 yang terealisasi untuk membiayai urusan wajib OPD saja atau untuk membiayai program kegiatan rutin kantor. Pagu Anggaran setelah perubahan yang tertuang pada DPPA Tahun Anggaran 2023 ini Sebesar Rp 71.309.041.275,- yang terdiri dari biaya gaji dan tunjangan ASN sejumlah Rp. 4,888,575,356 dan belanja penunjang kegiatan operasional OPD dan untuk membiayai program/kegiatan urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 66.420.465.919,-. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kinerja kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dalam
Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023

N O.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	PROGRAM/ KEGIATAN /sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	% Capaian Realisasi	Menunjang /Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	62.80%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	59%	37.05%	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penyediaan sarpras air bersih dan sanitasi						
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM	59%	37.05%	
				Pembangunan SPAM Jaringan	Jumlah sambungan	4500 SR	4500 SR	

				Perpipaan di Kawasan Perdesaan	rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya /SPAM berbasis masyarakat	4500 SR	4500 SR	
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 SR	10 SR	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	59 %	37.05%	
				Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air	59 %	37.05%	

				domestik dalam daerah Kab/Kota	Limbah Domestik setempat			
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	914 Rumah Tangga	914 Rumah Tangga	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	59 %	37.05%	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase permukiman yang tertangani	59 %	37.05%	
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	10000 M	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	55.56%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun	18 %	10%	

	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung pemerintah	Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif						
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber- IMB & berSlf	18 %	10 %	
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggara n Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300 d0c	300 d0c	
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a yang	3 unit	3 unit	

				Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya	18%	10%	
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Penataan bangunan dan lingkungannya yang tertangani	18 %	10 %	
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	3 Kawasan	
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	2 Kawasan	2 Kawasan	

					Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
1	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatn ya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	134.17%	PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	persentase Korban Bencana	48,20 %	64.67 %	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	48,20 %	64.67 %	
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terehabilitasi	9 Unit	9 Unit	

1				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	48,20 %	64.67 %	
a				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman	48,20 %	64.67 %	
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DATABASE RTLH yang disusun	2 doc	2 doc	
					Jumlah Dokumen Harga Standar Bahan Bangunan dan Upah	2 doc	2 doc	
b				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani	48,20%	64.67 %	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Di perbaiki	45 Unit	45 Unit	
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/	Luas Permukiman Kumuh yang	9 Ha	9 Ha	

				Peremajaan Permukiman Kumuh	Diremajakan/Dipugar			
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan	48,20%	64.67 %	
					Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan	48,20%	64.67 %	
				Verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 PSU Perumahan	10 PSU Perumahan	
					Jumlah Perumahan Yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	10 PSU Perumahan	10 PSU Perumahan	
	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya urusan pemerintahan	100 %	100 %	

	Kawasan Permukiman Terpenuhi Pelayanan Kesekretaria tan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Kesekretaria tan		KABUPATEN/KOTA				
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 doc	6 doc	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	9 laporan	9 laporan	

					Perangkat Daerah yang disusun			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bln	36 orang/bln	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Lap	3 Lap	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	100 %	100 %	

					Daerah yang tersusun			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 lap	9 lap	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31 lap	31 lap	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	104 paket	104 paket	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	19 paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	27 paket	27 paket	

					Kantor yang Disediakan			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	17 paket	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	17 doc	17 doc	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290 lap	290 lap	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 lap	9 lap	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	38 lap	38 lap	

					Umum Kantor yang Disediakan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipeliharaan	24 unit	24 unit	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	103 unit	103 unit	

					Dipelihara/Direhabilitasi			
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel :

@ Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat” . Dengan Indikator Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Dalam Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Keg. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

*Sub Keg. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

a. Keg. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

*Sub Keg. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

b. Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

*Sub Keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

*Sub Keg. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

a. Keg. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

*Sub Keg. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat” . Dengan Indikator Prosentase Penyediaan Sarpras air bersih dan sanitasi. Dalam Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Sub Keg. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Sub Keg. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

a. Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

* Sub Keg. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

a. Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Keg. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sasaran 2 :

*“ Meningkatnya Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung pemerintah”
. Dengan Indikator Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif.
Dalam Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :*

1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

a. Keg. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

* Sub Keg. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

* Sub Keg. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

a. Keg. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

* Sub Keg. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

* Sub Keg. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

b. Keg. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

* Sub Keg. Penataan Bangunan dan Lingkungan

* Sub Keg. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Sasaran 3 :

Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan" . Dengan Indikator Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan. Dalam Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

* Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - * Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - * Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - * Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - * Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - * Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - * Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - * Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - * Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - * Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - * Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - * Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - * Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - * Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - * Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - * Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - * Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

* Pemeliharaan Mebel

* Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	28.766.420.630	28.717.630.115	99.83%
a	Keg Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100.000.000	97,478,575	97.47 %
b	Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	28.666.420.630	28.620.151.540	99.83%
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	67,700,000	63.065.500	93.15%
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	67,700,000	63.065.500	93.15%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	104.500.000	100.000.000	95.69%
a	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	104.500.000	100.000.000	95.69%

	Relokasi Program Kabupaten/Kota			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.421.428.419	6.340.962.374	98.75%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.680.800	1.675.000	99.65%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,889,041,106	4.851.784.453	99.23%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	739.050	726.500	98.30%
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,894,475	68.655.491	99.65%
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.653.300	1.347.853.303	97.13%
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.029.188	69.880.377	95.68%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.783.743.000	8.753.738.195	99.66%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.783.743.000	8.753.738.195	99.65%
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	14,079,100,000	14.067.938.952	99.92 %

a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	14,079,100,000	14.067.938.952	99.92 %
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9,341,149,226	9.310.356.291	99.67%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,341,149,226	9.310.356.291	99.67%
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.395.000.000	3.296.213.515	97.09%
a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.395.000.000	3.296.213.515	97.09%
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	350.000.000	346.693.162	99.06%
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	346.693.162	99.05%

A. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman							
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi Masyarakat	48.20%	64.67%	134.17%	Rp.28.938.620.630	Rp.28.880.695.615	99.80%	0.2%
		59%	37.05%	62.80%	Rp.32.203.992.226	Rp.32.132.033.438	99.78%	0.22%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	18%	10%	55.56%	Rp.3.745,000.000	Rp.3.642.906.677	97.27%	2.73%
	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan Gedung pemerintah							

1	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	Rp6.421.428.419	Rp.6.340.962.374	98.75%	1,25%

Uraian penjelasan tabel:

- @ Berdasarkan penjelasan Tabel diatas, untuk Sasaran Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat dengan *indicator Prosentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni* pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 99.80% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,2%
- @ Berdasarkan penjelasan Tabel diatas, untuk Sasaran Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat dengan *indicator Prosentase penyediaan sarpras air bersih dan sanitasi* pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 99.78% dengan tingkat efisiensi sebesar 0.22%
- @ Berdasarkan penjelasan Tabel diatas, untuk Sasaran Meningkatnya kualitas tata bangunan dan gedung pemerintah dengan *indicator Bangunan dalam kondisi baik dan representatif* pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 97.27% dengan tingkat efisiensi sebesar 2.73%
- @ Berdasarkan penjelasan Tabel diatas, untuk Sasaran Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 98.75% dengan tingkat efisiensi sebesar 1.25%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 71.309.041.275 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 70.996.598.104 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98,90% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,1%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Bangkalan,

2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKLAN**



MOHAMMAD HASAN FAISOL,S.STP,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19830714200112100